

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, *Gender Gap* dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Fahrur Hamzah*

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Rosyadi

Universitas Tanjungpura

Metasari Kartika

Universitas Tanjungpura

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of government expenditures, gender gap and per capita income on the education and income inequalities of regencies and cities in West Kalimantan Province. This research used secondary data in a form of data panel. These data include time series data for 5 years (2011 – 2015) and cross-section data for 14 regencies and cities in West Kalimantan Province. The results showed that the government expenditures and per capita income have significant negative effect on the education inequality. In contrary, gender gap give insignificant positive effect on the education inequality. Furthermore, the education inequality has a significant positive effect on the income inequality.

Keywords : *education inequality, income inequality, gender gap*

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Menurut Taylor (2012) dalam Kuncoro (2015) bahwa ketimpangan (*inequality*) mendeskripsikan mengenai jurang antara mereka yang kaya berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah. Ketimpangan pendapatan yang terjadi pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat berfluktuasi. Pada tahun 2015, terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota yang berhasil menurunkan rasio ketimpangan pendapatan, sedangkan 5 (lima) kabupaten lainnya (Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kayong Utara) mengalami peningkatan rasio gini dari tahun sebelumnya.

* Korespondensi: Fahrur Hamzah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Indonesia, email : fahrurhamzah81@gmail.com.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi salah satunya disebabkan oleh faktor pendidikan masyarakat. Todaro & Smith (2011) mengatakan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Ketidakmerataan capaian pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk di suatu daerah dapat menciptakan ketimpangan pendidikan. Data BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat yang bekerja pada sektor formal berjumlah 769.996 jiwa atau 34,44% lebih sedikit dari penduduk yang bekerja di sektor informal yang berjumlah 1.465.891 jiwa atau 65,56%. Penciptaan tenaga kerja yang hanya bersumber dari sektor informal akan lebih banyak mengandalkan tenaga kerja dengan keahlian yang rendah (*low skill*), menerima upah yang rendah (*low paid*) dan tanpa proteksi sosial (Kuncoro, 2015).

Peran pemerintah melalui kebijakan pengalokasian anggaran bidang pendidikan, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, diharapkan dapat berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendidikan. Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan fungsi pendidikan rata-rata telah meningkat dalam kurun waktu tahun 2011-2015. Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Landak mengalokasikan anggaran bidang pendidikan yang terbesar diantara pemerintah kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar Rp. 374.025.005.281 atau 47,31% dari total belanja daerahnya, sedangkan Kabupaten Kayong Utara adalah daerah dengan alokasi terkecil yaitu sebesar Rp.150.421.519.787 atau 24,11% dari total belanja daerahnya.

Ketimpangan pendidikan juga dapat dilihat dari aspek kesetaraan *gender* yang terjadi pada suatu daerah. Suryadi & Idris (2010) mengatakan sektor pendidikan merupakan sektor yang paling menentukan dalam upaya perwujudan kesetaraan *gender* yang akan membuka kesempatan dan peluang dalam berbagai bidang. *Gender gap* di Kalimantan Barat selama 5 tahun (2011-2015) yang ditunjukkan melalui rasio persentase penduduk buta huruf perempuan terhadap laki-laki menunjukkan kondisi yang fluktuatif, dimana persentase penduduk perempuan yang buta huruf selalu lebih besar dibanding dengan penduduk laki-laki. Pada tahun 2015, sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota (Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak), memiliki peningkatan angka kesenjangan penduduk buta huruf perempuan terhadap laki-laki dari tahun sebelumnya. Kondisi yang paling timpang terjadi pada Kabupaten Sanggau dimana rasio penduduk buta huruf adalah 1 orang laki-laki berbanding 3,18 orang perempuan, sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Sintang dimana 1 orang laki-laki berbanding 1,99 orang perempuan.

Kemampuan masyarakat dalam mengalokasikan pendapatannya untuk pendidikan juga merupakan salah satu faktor menuju pemerataan distribusi pendidikan di suatu daerah. Todaro & Smith (2011) mengatakan bahwa suatu keluarga dengan jumlah anggota yang banyak serta memiliki pendapatan yang rendah maka akan membatasi ruang gerak para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Pendapatan per kapita

penduduk selama kurun waktu 2011-2015 pada semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan. Namun, peningkatan pendapatan per kapita tersebut ternyata belum mampu menyamai pendapatan per kapita provinsi lainnya dalam regional Kalimantan. Pendapatan per kapita tertinggi pada tahun 2015 dicapai oleh Kota Pontianak yaitu dengan nilai Rp. 34.226.641 per tahun, sedangkan pendapatan per kapita terendah diperoleh Kabupaten Melawi dengan nilai Rp. 14.320.309 per tahun.

Kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian terdahulu terkait permasalahan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendidikan, peneliti berpendapat bahwa hasil tersebut belum sepenuhnya dapat diaplikasikan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, mengingat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi fokus penelitian yang berbeda. Bahkan, beberapa diantaranya memiliki perbedaan hasil dan kesimpulan (*research gap*), misalnya penelitian yang dilakukan oleh Bustomi (2012) dengan penelitian yang dilakukan oleh Masyithah (2011) mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap ketimpangan pendidikan, serta penelitian Rahayu (2005) dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah, dkk (2014) mengenai pengaruh *gender gap* terhadap ketimpangan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menghitung dan menganalisis besarnya ketimpangan pendidikan, menguji dan menganalisis pengaruh anggaran pemerintah bidang pendidikan, *gender gap* dan pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendidikan serta menguji dan menganalisis pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat ke dalam sebuah judul penelitian “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, *Gender Gap* dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”.

2. KAJIAN LITERATUR

Adolf Wagner dalam Soepangat & Lumban Gaol (1991), mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan (*The Law of Ever Increasing State Activite*). Pengeluaran pemerintah sebagian dilakukan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2011). Peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicapai dengan mengurangi kesenjangan tingkat kesejahteraan antar golongan dalam masyarakat karena perbedaan tingkat pemilikan dan kesempatan penggunaan sumber daya ekonomi pada sektor swasta (Badrudin, 2012).

Salah satu bidang penting yang dibiayai melalui pengeluaran pemerintah adalah sistem pendidikan (Sukirno, 2011). Adisasmita (2013) mengatakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kapasitas produktif bangsa melalui pendidikan umum yang bersifat luas dan beraneka ragam. Pemerintah dapat menunjukkan perhatian pada usaha pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui besarnya pengeluaran pemerintah terhadap bidang pendidikan dan kesehatan (Sumarsono, 2009). Keseriusan pemerintah dalam memajukan pendidikan dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang mengatur besarnya alokasi anggaran bidang pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah.

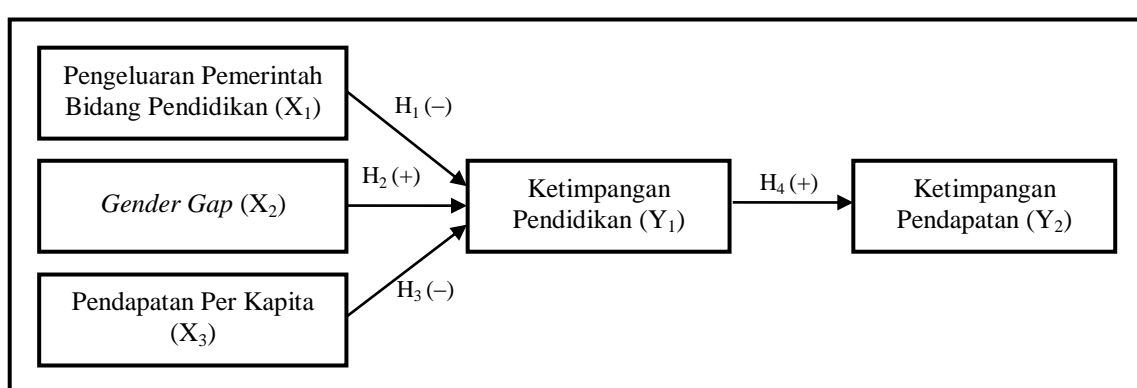
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menegaskan bahwa program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Namun, budaya yang masih melekat di beberapa masyarakat menyebabkan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan selalu lebih rendah daripada laki-laki (Jalal & Supriadi, 2001). *Gender gap* dalam pendidikan masih sering terjadi. Suryadi & Idris (2010) mengatakan bahwa nasib yang kurang beruntung biasanya menimpa anak perempuan dari keluarga ekonomi lemah, dimana mereka sering dihadapkan kepada suatu pilihan yang sangat sulit, terlebih lagi bila dipengaruhi oleh pandangan tentang *gender* yang masih keliru.

Kondisi ekonomi lemah sebagai akibat dari pendapatan yang rendah akan menjauhkan seseorang pada kehidupan yang makmur. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut (Kuncoro, 2015). Todaro & Smith (2011) mengatakan tingginya biaya pendidikan yang berkualitas menjadi penghalang bagi keluarga yang berpendapatan rendah untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Potret Pendidikan Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2016) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan seseorang masih dipengaruhi status ekonomi. Semakin tinggi status ekonomi seseorang, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Anak-anak yang tidak bisa menikmati dunia pendidikan dalam jumlah yang semakin banyak akan menyebabkan disparitas sosial yang sangat tinggi (Yamin, 2013). Negara dengan tingkat ketimpangan pendidikan tinggi secara konsisten menunjukkan tingkat inovasi yang lebih rendah, rendahnya tingkat efisiensi produksi, dan kecenderungan untuk mentransmisi kemiskinan lintas generasi (World Bank 2007). Ketimpangan pendidikan itu sendiri telah diformulasikan oleh Thomas *et al* (2010) melalui ukuran indeks gini pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut Todaro & Smith (2011) mengatakan bahwa kita juga dapat menggunakan koefisien Gini, yang juga dianalogikan dengan ketimpangan pendapatan dalam mengukur distribusi pendidikan.

Ketimpangan pendapatan dapat disebabkan oleh keberagaman faktor produksi yang dimiliki oleh setiap orang dalam suatu wilayah. Pendidikan seseorang akan menentukan seberapa besar peran ia sebagai tenaga kerja dalam memaksimalkan produktivitasnya dan mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Tenaga kerja yang terdidik dan terampil memungkinkan terciptanya pemerataan distribusi pendapatan di wilayah tersebut.

Berdasarkan landasan teoritis mengenai pengeluaran pemerintah, distribusi pendapatan, distribusi pendidikan, kesetaraan *gender* dalam pendidikan dan pendapatan per kapita masyarakat yang didukung dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu, penulis menyusun prosedur penelitian yang digambarkan dalam model penelitian seperti pada gambar berikut :



Gambar 1. Model Penelitian

2.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X_1) terhadap Ketimpangan Pendidikan (Y_1)

Todaro & Smith (2011) mengatakan intervensi yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan anggaran belanja pemerintah yang diperoleh dari pajak dengan meningkatkan pendapatan orang-orang miskin secara langsung maupun tidak langsung, misalnya perluasan akses pendidikan dasar. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Bustomi (2012) dan Saputra, dkk (2015) menyimpulkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendidikan secara signifikan.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, penulis menduga bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah bidang pendidikan masing-masing pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, maka akan mengurangi ketimpangan pendidikan yang terjadi di daerah tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis pertama yang penulis gunakan adalah :

H₁ : X_1 (pengeluaran pemerintah bidang pendidikan) berpengaruh negatif terhadap Y_1 (ketimpangan pendidikan) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2.2. Pengaruh Gender Gap (X_2) terhadap Ketimpangan Pendidikan (Y_1)

Todaro & Smith (2011) mengatakan kebanyakan negara berkembang, perempuan muda menerima pendidikan yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki muda. Hampir semua bagian di dunia anak-anak perempuan masih tertinggal dari anak-anak laki-laki. Sebagian besar orang yang buta aksara dan yang tidak bersekolah di negara-negara berkembang adalah perempuan. Pengaruh kesenjangan *gender* (*gender gap*) pernah diteliti oleh Sholikhah, dkk (2014) dengan kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara *gender gap* terhadap ketimpangan pendidikan.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, penulis menduga bahwa adanya *gender gap* yang dilihat dari kesenjangan rasio angka melek huruf antara laki-laki dan perempuan yang besar pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat akan meningkatkan ketimpangan pendidikan yang terjadi pada masing-masing daerah tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis kedua yang penulis gunakan adalah :

H₂ : X_2 (*gender gap*) berpengaruh positif terhadap Y_1 (ketimpangan pendidikan) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2.3. Pengaruh Pendapatan Per Kapita (X_3) terhadap Ketimpangan Pendidikan (Y_1)

Todaro & Smith (2011) mengatakan ketika orang-orang berpendapatan rendah tidak dapat meminjam uang, mereka umumnya tidak berdaya untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak mereka dengan baik atau tidak dapat memulai atau memperluas usahanya. Hal ini menjelaskan suatu hubungan antara pendidikan yang ditempuh dengan seberapa besar dari pendapatan yang diperoleh. Ketidakmerataan pendidikan yang terjadi dapat disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat dalam menghidupi diri dan keluarganya. Penelitian yang dilakukan Komar (2004) menyimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita maka akan semakin tinggi keberhasilan di bidang pendidikan.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, penulis menduga bahwa pendapatan per kapita kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang rendah akan meningkatkan ketimpangan pendidikan yang terjadi pada masing-masing daerah tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis ketiga yang penulis gunakan adalah :

H₃ : X_3 (pendapatan per kapita) berpengaruh negatif terhadap Y_1 (ketimpangan pendidikan) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2.4. Pengaruh Ketimpangan Pendidikan (Y_1) terhadap Ketimpangan Pendapatan (Y_2)

Todaro & Smith (2011) mengatakan alasan utama dari akibat buruk pendidikan formal terhadap distribusi pendapatan adalah adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan selama hidup. Korelasi ini khususnya berlaku bagi para pekerja yang dapat menyelesaikan sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi, dimana selisih pendapatannya dibandingkan dengan pekerja yang hanya menyelesaikan sebagian atau seluruh pendidikan dasar berada pada kisaran 300% sampai 800%. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan Saifuddin (2014) menyimpulkan bahwa ketimpangan pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, penulis menduga bahwa ketimpangan pendidikan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang semakin besar akan meningkatkan terjadinya ketimpangan pendapatan pada masing-masing daerah tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis keempat yang penulis gunakan adalah :

H₄ : Y_1 (ketimpangan pendidikan) berpengaruh positif terhadap Y_2 (ketimpangan pendapatan) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif dan asosiatif/hubungan, yang dimaksudkan untuk mengetahui besarnya ketimpangan pendidikan yang terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat serta keterkaitan variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, *gender gap*, dan pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Jenis data yang digunakan bersifat data urut waktu (*time series*) selama 5 tahun yang dimulai dari tahun 2011 hingga 2015 dan data data silang (*cross section*) untuk 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.

Definisi operasional masing-masing variabel penelitian antara lain: (1) Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan adalah besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, yang dinyatakan dalam satuan rupiah. (2) *Gender gap* adalah rasio penduduk buta huruf perempuan terhadap penduduk buta huruf laki-laki. (3) Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah, yang dinyatakan dalam satuan rupiah. (4) Ketimpangan pendidikan adalah kondisi ketidakmerataan pendidikan tertinggi yang

ditamatkan oleh penduduk di suatu daerah yang dihitung dengan indeks gini pendidikan. (5) Ketimpangan pendapatan adalah kondisi dimana pendapatan tidak terdistribusi secara merata antar lapisan masyarakat yang ditunjukkan dengan rasio gini.

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Analisis Gini Pendidikan

Penghitungan ketimpangan pendidikan adalah dengan menggunakan persamaan Indeks Gini Pendidikan yang diformulasikan oleh Thomas, *et.al* (2001), yaitu :

$$E_L = \left(\frac{1}{\mu}\right) \sum_{i=2}^n \sum_{j=0}^{i-1} p_i |y_i - y_j| p_j \dots\dots\dots (1)$$

Berdasarkan ketersediaan data serta merujuk pada penelitian Saputra, dkk (2015), maka persamaan di atas dapat diperluas menjadi :

$$EL = \left(\frac{1}{\mu}\right) [p_2(y_2 - y_1)p_1 + p_3(y_3 - y_1)p_1 + p_3(y_3 - y_2)p_2 + \dots + p_n(y_n - y_1)p_1 + p_n(y_n - y_2)p_2 + \dots + p_n(y_n - y_{n-1})p_{n-1}] \dots\dots\dots (2)$$

dimana :

- E_L : Indeks gini pendidikan yang didasarkan pada distribusi pencapaian sekolah.
- μ : Rata-rata masa sekolah dari populasi yang bersangkutan.
- p_1 : Proporsi populasi belum/tidak tamat SD.
- p_2 : Proporsi populasi tamat SD.
- p_3 : Proporsi populasi tamat SMP.
- p_4 : Proporsi populasi tamat SMA.
- p_5 : Proporsi populasi tamat D1/D2/D3.
- p_6 : Proporsi populasi tamat D4/S1.
- p_7 : Proporsi populasi tamat S2/S3.

Untuk menghitung tahun bersekolah pada 7 (tujuh) tingkatan tersebut adalah:

- Belum/tidak tamat SD : $y_1 = 0,5$ SD = 3 tahun;
- Tamat SD : $y_2 = 6$ tahun;
- Tamat SMP : $y_3 = y_2 + \text{SMP} = 9$ tahun;
- Tamat SMA : $y_4 = y_3 + \text{SMA} = 12$ tahun;
- Tamat D1/D2/D3 : $y_5 = y_4 + \text{D3} = 15$ tahun
- Tamat D4/S1 : $y_6 = y_5 + 1$ tahun = 16 tahun
- Tamat S2/S3 : $y_7 = y_6 + \text{S3} = 20$ tahun.

2. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini mempergunakan model regresi dua tahap karena terdapat 2 (dua) variabel dependen (Y). Sebagaimana model regresi dua tahap yang dikemukakan oleh Ferdinand (2007), model regresi dua tahap pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel endogen intervening Y_1 dipengaruhi oleh 3 (tiga) variabel eksogen X_1 , X_2 , dan X_3 . Sementara itu variabel endogen Y_1 akan mempengaruhi variabel endogen dependen Y_2 .

Regresi tahap kesatu dilakukan dengan menggunakan teknik regresi berganda untuk melihat pengaruh variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X_1), Pendapatan Per Kapita (X_2) dan *Gender Gap* (X_3) terhadap Ketimpangan Pendidikan (Y_1) sebagai variabel endogen intervening, dengan persamaan model regresi sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \mu_1 \quad \dots\dots\dots (3)$$

Model regresi tahap kedua adalah melakukan olah data menggunakan teknik regresi sederhana untuk melihat pengaruh variabel endogen intervening, yaitu Ketimpangan Pendidikan (Y_1) yang berbentuk estimasi \hat{Y}_1 terhadap Ketimpangan Pendapatan (Y_2) sebagai variabel endogen dependen, dengan persamaan model regresi sebagai berikut :

$$Y_2 = \gamma_0 + \gamma_1 \hat{Y}_1 + \mu_2 \quad \dots\dots\dots (4)$$

Variabel ketimpangan pendidikan estimasi merupakan variabel yang telah dipengaruhi secara simultan oleh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pendapatan per kapita dan *gender gap*, sebagai hasil uji regresi tahap kesatu.

2.1. Pemilihan Model

Analisis regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini memerlukan uji spesifikasi model untuk menentukan model mana yang dianggap tepat dalam proses regresi model fungsi dengan menggunakan aplikasi EViews. Sarwono (2016) mengatakan, dalam EViews kita diminta untuk memilih antara pilihan *Fixed Effect Model* yang disingkat FEM atau *Random Effect Model* (REM).

Dalam memilih model yang sesuai dan paling tepat diantara tiga jenis model yaitu *pooled least square*, *fixed effect model* atau *random effect model* yang akan digunakan maka perlu dilakukan serangkaian uji yaitu :

1. Uji Chow (*Chow test*), yaitu pengujian untuk memilih apakah model *pooled least square* atau model *fixed effect* yang akan dipilih.
2. Uji Hausman (*Hausman test*) dilakukan untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang dipilih.

2.2. Uji Kelayakan Model

Setelah melewati pengujian pemilihan model, maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis berupa uji statistik. Pengujian dilakukan untuk menentukan baik atau tidaknya model melalui uji kesesuaian (*fit of goodness test*) dari model (R^2), uji serempak (*F test*) maupun uji secara parsial (*t test*). Uji tersebut menentukan diterima atau tidaknya hipotesis nol.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Ketimpangan Pendidikan

Hasil perhitungan indeks gini pendidikan menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan yang terjadi pada sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 2011 – 2015 berada pada kondisi yang fluktuatif (tabel 1). Nilai indeks gini pendidikan kabupaten/kota pada tahun 2015 yang berada pada rentang 0,26 – 0,32 menunjukkan bahwa sebanyak 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat telah berada pada ketimpangan pendidikan tingkat rendah, kecuali Kabupaten Kayong Utara yang masih dalam kategori ketimpangan tingkat sedang dengan nilai indeks gini pendidikan sebesar 0,37.

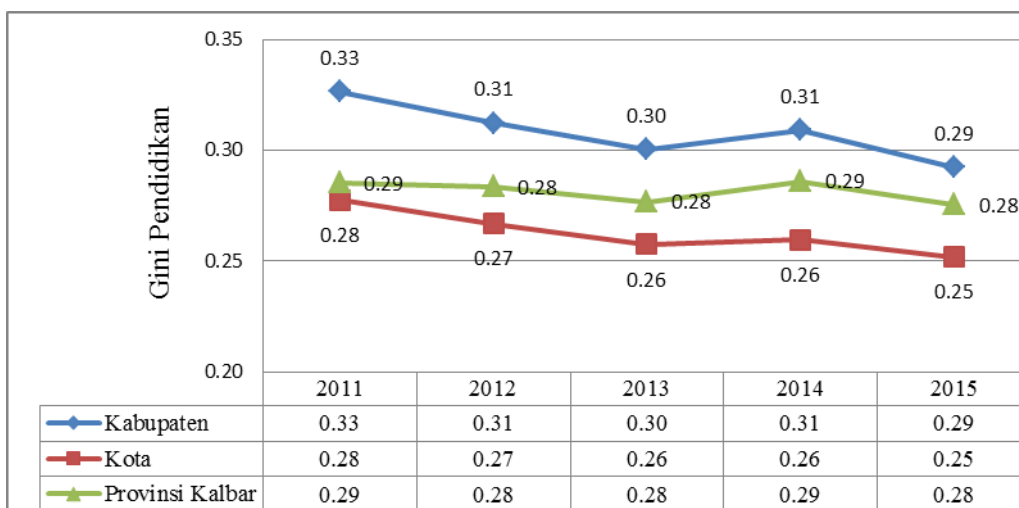
Kondisi ketimpangan pendidikan di Kabupaten Kayong Utara tersebut dapat disebabkan masih rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang dicapai penduduknya. RLS Kabupaten Kayong Utara setiap tahunnya terus meningkat dan bahkan rata-rata laju pertumbuhan RLS Kabupaten Kayong Utara adalah yang paling tinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai sebesar 4,45% per tahun selama kurun waktu 2011 – 2015. Walau demikian, RLS yang dicapai pada tahun 2015 masih yang terendah, dengan angka 5,37 tahun. Angka RLS tersebut berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Kayong Utara yang berusia 15 tahun ke atas hanya mengenyam pendidikan hanya sampai kelas 5 sekolah dasar.

Tabel 1. Ketimpangan Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 – 2015

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Gini Pendidikan				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Sambas	0,36	0,35	0,35	0,34	0,32
2	Bengkayang	0,32	0,33	0,30	0,33	0,32
3	Landak	0,28	0,27	0,26	0,27	0,26
4	Mempawah	0,34	0,32	0,32	0,32	0,31
5	Sanggau	0,30	0,30	0,29	0,30	0,27
6	Ketapang	0,30	0,30	0,30	0,31	0,27
7	Sintang	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
8	Kapuas Hulu	0,32	0,28	0,26	0,28	0,26
9	Sekadau	0,28	0,27	0,27	0,28	0,26
10	Melawai	0,33	0,34	0,29	0,30	0,29
11	Kayong Utara	0,42	0,38	0,35	0,37	0,37
12	Kubu Raya	0,34	0,32	0,31	0,32	0,30
13	Pontianak	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21

14	Singkawang	0,31	0,31	0,29	0,31	0,30
	Kalimantan Barat	0,29	0,28	0,28	0,29	0,28

Hasil penelitian selama 5 tahun pengamatan tersebut menunjukkan fakta bahwa indeks gini pendidikan wilayah kabupaten selalu lebih tinggi daripada wilayah kota. Indeks gini pendidikan wilayah kota yang lebih rendah dapat diartikan bahwa tingkat pemerataan distribusi pendidikan pada wilayah kota lebih baik daripada wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 2. Rata-rata Indeks Gini Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 – 2015

Perbedaan ketimpangan pendidikan antara wilayah kota dengan wilayah kabupaten dapat disebabkan oleh adanya perbedaan jumlah anggaran bidang pendidikan yang dialokasikan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Selama tahun 2011 hingga 2015, rata-rata anggaran bidang pendidikan yang dialokasikan seluruh pemerintah daerah kabupaten (sebanyak 12 kabupaten) sebesar Rp. 289.079.541.014 atau sebesar 33,78% dari total belanja daerah. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dari rata-rata anggaran bidang pendidikan yang dialokasikan seluruh pemerintah daerah di wilayah kota (sebanyak 2 kota) sebesar Rp. 347.377.266.895 atau sebesar 36,11% dari total belanja daerah.

Komitmen pemerintah daerah di wilayah perkotaan lebih besar dalam mengalokasikan anggaran bidang pendidikan dapat disebabkan adanya sumber pendapatan asli daerah di wilayah perkotaan lebih besar dibandingkan wilayah kabupaten. Daerah yang memiliki kemampuan anggaran yang besar akan lebih leluasa dalam meningkatkan kualitas pendidikan penduduknya dengan memberi porsi anggaran pendidikan yang besar.

Disamping adanya keterbatasan anggaran, kemudahan dalam menjangkau fasilitas pendidikan yang dirasakan oleh penduduk di wilayah kabupaten juga dapat menjadi faktor penentu. Luas wilayah kabupaten yang lebih besar dengan jumlah

penduduk yang lebih sedikit menjadikan wilayah kabupaten memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah dengan persebaran penduduk yang lebih tidak merata dibandingkan wilayah kota. Luas wilayah yang lebih kecil dengan persebaran penduduk yang relatif merata akan memudahkan pemerintah daerah di wilayah kota dalam membangun fasilitas pendidikan di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh penduduk.

4.2. Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil *Chow test* dan *Hausman test*, maka diperoleh *Pooled EGLS* (*Cross-section random effects*) sebagai model terbaik dalam regresi tahap kesatu, dengan output statistik sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Output Statistik Regresi Tahap Kesatu

Variabel	Koefisien	t statistik	Probabilitas	Keterangan*
C	0.400247	13.09962	0.0000	
EDUCSPEND (X ₁)	-8.48E-14	-2.061852	0.0432	Signifikan
GENDERGAP (X ₂)	0.001153	0.323377	0.7474	Tidak Signifikan
INCPERCAP (X ₃)	-3.73E-09	-2.181535	0.0327	Signifikan

*) Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,383579 menunjukkan bahwa kemampuan variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pendapatan Per Kapita dan *Gender Gap* dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap Ketimpangan Pendidikan adalah sebesar 38,36%, sedangkan sisanya sebesar 61,64% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam model regresi. Persamaan regresi tahap kesatu dapat disusun sebagai berikut :

$$Y_1 = 0.400247 - 8.48E-14X_1 + 0.001153X_2 - 3.73E-09X_3 \dots\dots\dots (5)$$

Model terbaik dalam regresi tahap kedua berdasarkan hasil *Chow test* dan *Hausman test* adalah *Pooled EGLS* (*Cross-section weights*), dengan output statistik sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Output Statistik Regresi Tahap Kedua

Variabel	Koefisien	t statistik	Probabilitas	Keterangan*
C	0.129542	1.355639	0.1808	
EDUCINEQCAP (\hat{Y}_1)	0.647561	2.044729	0.0457	Signifikan

*) Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.423057 menunjukkan bahwa kemampuan variabel ketimpangan pendidikan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan adalah sebesar 42,31 %, sedangkan sisanya sebesar 57,69% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam model regresi. Persamaan regresi tahap kedua dapat disusun sebagai berikut :

$$Y_2 = 0,129542 + 0,647561 \bar{Y}_1 \dots\dots\dots (6)$$

a. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendidikan

Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap ketimpangan pendidikan yang terjadi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat adalah negatif dan signifikan. Hal ini berarti jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan meningkat dengan asumsi *ceteris paribus* maka indeks gini pendidikan akan menurun mendekati angka 0 (nol) yang berarti ketimpangan pendidikan akan semakin rendah atau distribusi pendidikan yang diterima penduduk akan merata.

Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan tersebut dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Kalimantan Barat secara merata. Jumlah infrastruktur pendidikan berupa sekolah yang dibangun pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat antara tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan peningkatan mulai dari pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas/kejuruan. Peningkatan tertinggi dalam penyediaan unit sekolah dasar dan menengah pertama adalah Kabupaten Melawi, dimana terjadi peningkatan sebanyak 55 unit sekolah dasar dan 30 unit sekolah menengah pertama. Pada jenjang sekolah menengah umum dan kejuruan, peningkatan penyediaan unit sekolah paling banyak dilakukan oleh Kabupaten Kubu Raya dengan penambahan sebesar 21 unit sekolah.

Penelitian ini sejalan dengan Bustomi (2012) dan Saputra, dkk (2015), namun berbeda dengan hasil penelitian Sholikhah, dkk (2014) yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendidikan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2008 – 2012. Sholikhah, dkk (2014) menyebutkan bahwa alokasi investasi yang tidak tepat sasaran sehingga besarnya pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan ternyata turut memperbesar ketimpangan pendidikan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur

Keberhasilan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan jumlah sekolah di tiap desa/kelurahan berdampak terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2011- 2015. Peningkatan angka partisipasi sekolah pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2011 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Angka Partisipasi Sekolah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 dan 2015 (Persen)

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun 2011			Tahun 2015		
		SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat
1.	Sambas	97,80	86,45	54,00	99,30	89,89	71,40
2.	Bengkayang	96,60	84,48	54,60	97,10	85,85	61,40
3.	Landak	96,30	85,66	66,70	97,90	93,65	69,90
4.	Mempawah	97,40	78,77	38,10	98,10	95,88	67,40
5.	Sanggau	92,50	74,51	37,70	98,40	91,92	50,80
6.	Ketapang	94,40	83,24	40,30	96,20	83,31	60,80
7.	Sintang	95,30	78,17	32,30	97,60	91,68	58,10
8.	Kapuas Hulu	96,10	88,26	52,40	98,80	93,16	74,50
9.	Sekadau	97,40	85,93	39,40	98,00	88,70	62,10
10.	Melawi	95,50	78,17	43,10	96,30	87,98	59,60
11.	Kayong Utara	97,10	85,63	54,20	99,20	98,82	74,10
12.	Kubu Raya	96,10	85,94	51,90	99,30	94,95	69,40
13.	Pontianak	99,10	89,88	64,20	99,40	98,75	83,50
14.	Singkawang	95,10	80,96	53,60	99,20	90,20	59,20
Kalimantan Barat		96,20	83,67	49,90	98,30	91,91	66,80

b. Gender Gap Terhadap Ketimpangan Pendidikan

Pengaruh ketimpangan *gender* atau *gender gap* terhadap ketimpangan pendidikan yang terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan arah yang sesuai (positif) dengan relevansi teori namun tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil ini memberi gambaran bahwa saat ini peningkatan angka perbandingan kaum perempuan terhadap laki-laki yang buta huruf tidak mutlak akan menyebabkan peningkatan angka indeks gini pendidikan.

Upaya pemerintah dalam memberi kesempatan yang sama bagi kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah perempuan yang melek huruf atau menurunnya rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang buta huruf selama kurun waktu 2011-2015. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS tahun 2011 – 2015 menunjukkan telah terjadi penurunan rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang buta huruf di Provinsi Kalimantan Barat.

Jumlah penduduk perempuan yang buta huruf di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 sebesar 12,71% menurun 1,18% di tahun 2015 dengan persentase sebesar 11,53%. Perbandingan jumlah penduduk perempuan terhadap laki-laki yang buta huruf pada tahun 2011 menunjukkan rasio 1 : 2,57 sedangkan pada tahun 2015 rasio tersebut menurun menjadi 1 : 2,32. Rasio tersebut memberi gambaran bahwa pada tahun 2011 terdapat 1 orang penduduk laki-laki yang buta huruf adalah sebanding dengan 3 orang penduduk perempuan yang buta huruf, sedangkan pada tahun 2015 jumlah perbandingan telah menurun dimana 1 orang penduduk laki-laki yang buta huruf adalah sebanding dengan 2 orang penduduk perempuan yang buta huruf.

Tabel 5. Persentase Penduduk Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 dan 2015

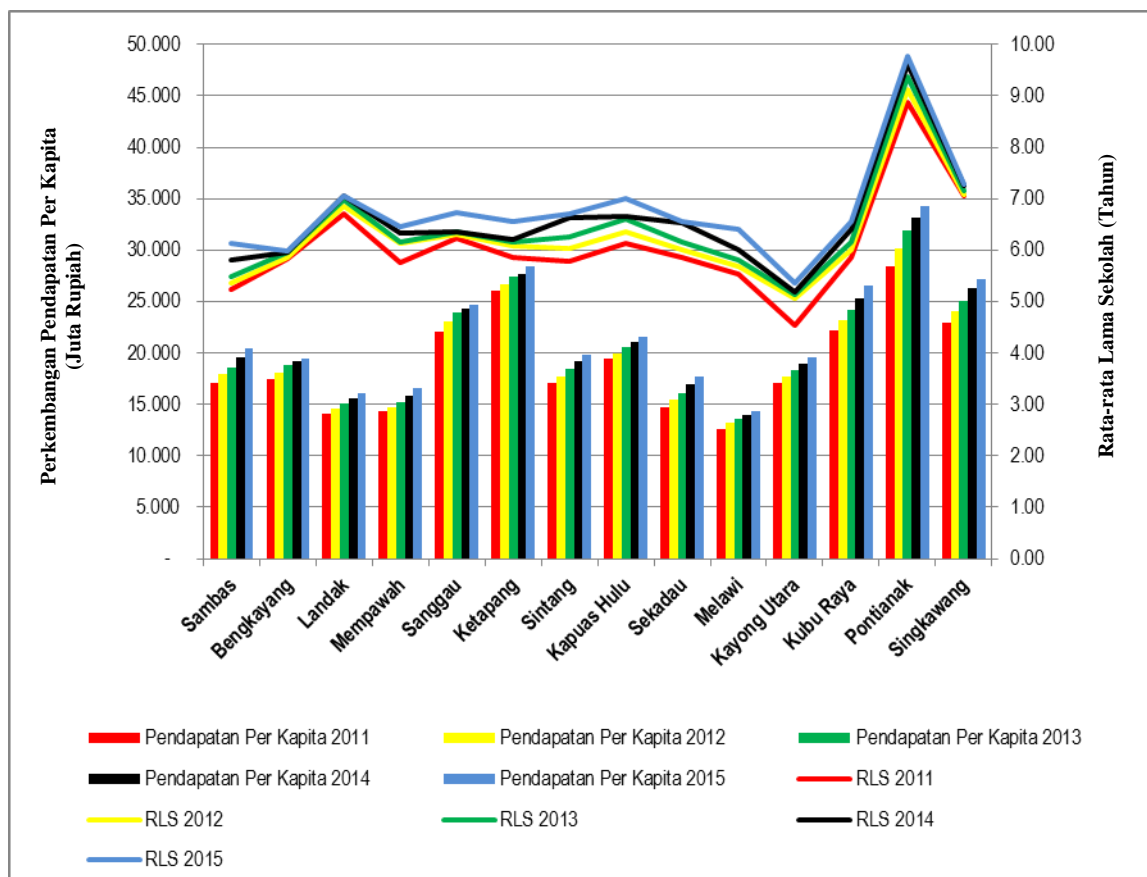
Jenis Kelamin	Kemampuan Membaca dan Menulis			
	Tahun 2011		Tahun 2015	
	Membaca dan Menulis	Buta Huruf	Membaca dan Menulis	Buta Huruf
Laki-laki	95,06	4,94	95,02	4,98
Perempuan	87,29	12,71	88,47	11,53
Laki-laki + Perempuan	91,24	8,76	91,81	8,19

Kesetaraan *gender* dalam dunia pendidikan di Kalimantan Barat yang mulai meningkat menunjukkan bahwa paradigma orang tua atau tradisi masyarakat dalam memandang peran kaum perempuan hanya sebatas di lingkungan rumah lambat laun mulai berubah. Meningkatnya angka melek huruf bagi penduduk perempuan menggambarkan bahwa sudah semakin banyak anak-anak dan perempuan dewasa yang mengenyam pendidikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2005) yang menyebutkan bahwa pengaruh yang tidak signifikan tersebut karena saat ini sistem pendidikan telah memberikan prioritas yang sama antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Sholikhah, dkk (2014) yang menyatakan terdapat hubungan positif signifikan antara variabel *gender gap* dengan ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Timur, serta penelitian Bustomi (2012) yang menyatakan variabel *gender gap* berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

c. Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan

Pendapatan per kapita kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat memberikan pengaruh yang signifikan pada arah yang negatif terhadap ketimpangan pendidikan. Tingkat signifikansi dan arah hubungan yang negatif memberi pengertian jika pendapatan per kapita meningkat dengan asumsi *ceteris paribus* maka indeks gini pendidikan akan menurun yang berarti ketimpangan pendidikan akan semakin rendah atau distribusi pendidikan yang diterima penduduk semakin merata. Tren peningkatan pendapatan per kapita selama tahun 2011 hingga 2015 diiringi pula dengan meningkatnya angka rata-rata lama sekolah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat (Gambar 3).



Gambar 3. Perkembangan Pendapatan Per Kapita dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 - 2015

Kemampuan membiayai kebutuhan dalam menempuh pendidikan tergantung dari pendapatan yang diperolehnya. Seseorang yang berpendapatan rendah dan berada di bawah garis kemiskinan akan menggunakan pendapatannya untuk lebih mendahulukan kebutuhan pangannya daripada mengalokasikan dananya untuk pendidikan yang tingkat pengembaliannya (manfaat) tidak bisa langsung mereka rasakan. Perlu disadari bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka biaya yang dibutuhkan juga akan lebih besar dibandingkan jenjang sebelumnya. Kondisi demikian akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk melanjutkan pendidikannya.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil olah Susenas (BPS) tahun 2016 juga menunjukkan bahwa terjadi disparitas dalam mengenyam pendidikan antar penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi yang berbeda. Semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, maka semakin tinggi angka partisipasi kasar (APK) yang dihasilkan dan pola tersebut semakin terlihat jelas seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Program wajib belajar sembilan tahun yang digalakkan pemerintah terlihat cukup efektif dalam merangkul penduduk untuk mengenyam pendidikan pada jenjang SD/ sederajat. Namun, disparitas nilai APK antar status ekonomi rumah tangga mulai terlihat semakin nyata pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah/ sederajat. Partisipasi

sekolah menengah ke atas lebih besar di rumah tangga dengan status ekonomi tinggi dibandingkan rumah tangga dengan status ekonomi rendah, bahkan perbedaan yang dihasilkan menyentuh angka 30 persen. Pada jenjang Perguruan Tinggi menunjukkan kesenjangan yang semakin melebar lebih dari 40%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Komar (2004) dimana dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita maka akan semakin tinggi keberhasilan di bidang pendidikan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Widodo (2013), dimana kesimpulan penelitiannya menyebutkan bahwa pendapatan per kapita tidak memberikan pengaruh terhadap indeks pendidikan yang diukur dengan angka melek dan rata-rata lama sekolah.

d. Ketimpangan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam arah yang positif. Hal ini memperlihatkan jika terjadi kenaikan ketimpangan pendidikan sebagai akibat dari pengaruh variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pendapatan per kapita penduduk dan kesenjangan *gender* (*gender gap*) secara bersama-sama, maka juga akan meningkatkan ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan asumsi *ceteris paribus*.

Pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi dapat dianalisis berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki setiap penduduk yang bekerja. Ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 dengan kategori ketimpangan rendah dapat disebabkan karena telah terjadi peningkatan tingkat pendidikan penduduk yang bekerja dari tahun sebelumnya. Berita Resmi Statistik BPS menunjukkan jumlah penduduk Kalimantan Barat yang bekerja tahun 2015 yang berjumlah 2.236.000 jiwa mengalami peningkatan dari tahun 2014 yang berjumlah 2.220.000 jiwa.

Berdasarkan Tabel 6 di bawah ini, dapat diidentifikasi bahwa pekerja dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar ke bawah, sekolah kejuruan dan diploma mengalami penurunan masing-masing 64 ribu orang (4,97%), 3 ribu orang (2,7%), dan 2 ribu orang (3,8%), sedangkan pekerja dengan latar belakang pendidikan lainnya mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup besar adalah pekerja dengan pendidikan sarjana yaitu sekitar 20 ribu jiwa (19,80%).

Tabel 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2014-2015 (ribu jiwa)

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Tahun	
		2014	2015
1.	SD ke bawah	1.280	1.216
2.	Sekolah Menengah Pertama	354	377
3.	Sekolah Menengah Atas	321	363
4.	Sekolah Menengah Kejuruan	113	110
5.	Diploma I/II/III	51	49
6.	Universitas	101	121
Jumlah		2.220	2.236

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS 2015.

Kondisi tersebut akan membuka peluang yang besar bagi peningkatan pendapatan pekerja di Kalimantan Barat, sebagaimana yang disampaikan oleh Sumarsono (2009) dimana pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesempatan untuk mendapat upah yang lebih tinggi. Kesesuaian hasil yang diperoleh dengan penelitian terdahulu, bahwa penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin (2014), dimana ketimpangan pendidikan yang terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

5. SIMPULAN

Kondisi ketimpangan pendidikan pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2011-2015 berfluktuasi. Pada tahun 2015, sebanyak 13 kabupaten/kota telah berada dalam kategori ketimpangan pendidikan tingkat rendah dan hanya Kabupaten Kayong Utara yang masih dalam kategori ketimpangan pendidikan tingkat sedang. Ketimpangan pendidikan di wilayah kabupaten selalu lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan.

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya ketimpangan pendidikan dalam arah yang negatif. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat mengoptimalkan pengeluaran bidang pendidikan untuk memenuhi fasilitas pendidikan terutama pendidikan dasar bagi masyarakat di daerah yang tertinggal/terpencil agar penduduk dapat mudah mengakses fasilitas pendidikan sehingga program pemerintah di bidang pendidikan dapat terealisasi dengan baik.

Hubungan *gender gap* terhadap ketimpangan pendidikan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat memberikan pengaruh yang positif dan tidak signifikan. Angka partisipasi sekolah kaum perempuan penduduk kabupaten/kota di Provinsi

Kalimantan Barat yang relatif tidak berbeda dengan laki-laki dan bahkan telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Walaupun demikian, Pemerintah kabupaten/kota harus tetap berperan aktif dalam mendorong kesadaran para orang tua melalui program pendidikan dasar serta memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan bagi anak perempuan mereka.

Pendapatan per kapita penduduk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendidikan dalam arah yang negatif. Pendapatan per kapita yang meningkat akan membuka kesempatan penduduk untuk menamatkan pendidikan dasarnya serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan per kapita daerahnya dengan cara menggali sektor-sektor yang memiliki potensi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim usaha yang baik agar penduduknya dapat tetap bekerja.

Ketimpangan pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam arah yang positif. Pemerintah kabupaten/kota dipandang perlu untuk terus menekan ketimpangan pendidikan agar ketimpangan pendapatan penduduknya tidak meningkat. Pemerataan kesempatan penduduk dalam mengenyam pendidikan harus diupayakan secara maksimal oleh pemerintah melalui alokasi dan penggunaan anggaran bidang pendidikan yang tepat sasaran serta berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperbesar pendapatan per kapita daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi : Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STI YKPN.
- Bustomi, M. J. (2012). Ketimpangan Pendidikan Antar Kabupaten/Kota dan Implikasinya di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal* (ISSN 2252-6560): pp 1 - 10.
- Ferdinand, A. (2007). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jalal, F., & Supriadi, D. (2011). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Depdiknas - Bappenas - Adicita Karya Nusa.
- Komar, O. (2004). Keterkaitan Kualitas Penduduk dengan Masalah Pendidikan. *Jurnal Kependudukan Padjajaran* (ISSN 14115034): pp 87 - 94.

- Kuncoro, M. (2015). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Masyithah. (2011). *Ketimpangan Pendidikan Antar Kabupaten/Kota dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Provinsi Jawa Tengah 2005-2009*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Rahayu, A. (2003). *Ketimpangan Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Saifuddin. (2014). *Pengaruh Ketimpangan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat*. Bogor: Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sarwono, J. (2016). *Prosedur-Prosedur Analisis Populer Aplikasi Riset Skripsi dan Tesis dengan EVIEWS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sholikhah, N., Suratman, B., Soesatyo, Y., & Soejoto, A. (2014). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan* , Jilid 20: pp 176 - 182.
- Soepangat, E., & Lumban Gaol, H. (1991). *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi : Teori Pengantar* (Ketiga ed.). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryadi, A., & Idris, E. (2010). *Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*. Bandung: PT. Genesindo.
- Thomas, V., Wang, Y., & Fan, X. (2001). Measuring Education Inequality : Gini Coefficients of Education. *World Bank Policy Research Working Papers 2525*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th Edition ed., Vol. I). Jakarta: Erlangga.
- Widodo. (2013). *Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pendidikan Di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- World Bank. (2007). Investing in Indonesia's Education : Allocation, Equity and Efficiency of Public Expenditures. *Report Poverty Reduction and Economics Management Unit* .
- Yamin, M. (2013). *Ideologi & Kebijakan Pendidikan*. Malang: Madani.